



Penataan Kawasan Kumuh Berkonsep Riverside Pedestrian

■ Biaya untuk Tiga Wilayah Bantaran Sungai
Dianggarkan Rp13 M

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mulai melakukan penataan kawasan kumuh di tiga wilayah. Penataan yang digulirkan tahun ini dibiayai pemerintah pusat dengan alokasi anggaran Rp13 miliar.

Berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui program peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan, ketiga wilayah itu meliputi Jogoyudan, Wirogunan dan Terban.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menandatangani, mayoritas kawasan kumuh yang ditata ini berada di bantaran sungai. Sehingga, konsep yang dikedepankan yakni riverside pedestrian, atau membangun ruang dan akses bagi pejalan kaki di wilayah yang berbatasan langsung dengan sungai.

Alhasil, untuk memberikan ruang bagi riverside pedestrian yang lebarnya bervariasi antara 3 meter sampai 3,5 meter itu, setiap rumah terdampak harus dikesampingkan. Posisinya, otomatis harus sedikit mundur dari bantaran, untuk diberikan akses bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan tersebut.

Namun, ia memastikan, konsep itu telah disepakati

TINGKATKAN KUALITAS PERMUKIMAN

- Pemkot menata tiga kawasan kumuh di wilayah Kota Yogyakarta.
- Penataan dibiayai pemerintah pusat dengan alokasi anggaran Rp13 miliar.
- Ketiga wilayah itu meliputi Jogoyudan, Wirogunan dan Terban.
- Konsepnya adalah riverside pedestrian.

bersama warga setempat. Menurutnya, warga yang kondisi rumahnya kini berhimpitan dengan bantaran, bersedia ditata dengan mengacu sisten M3K (Mundur Munggah Madhep Kali).

"Kita sudah melakukan pendekatan persuasif. Tujuan kita adalah penataan, untuk menjadikan kawasan yang sehat dan produktif. Sehingga, potensi-potensi yang ada di masyarakat bisa kita kembangkan," ungkap Heroe, Jumat (2/4).

"Jadi, ini bukan sebatas menata pinggir sungai. Tapi nanti dibarengi penataan sosial kelembagaannya, terutama untuk mempersiapkan pengembangan potensi," tambahnya.

Orang nomor dua di kota pelajar itu menjelaskan, Akan tetapi, imbuhnya, Pemkot Yogyakarta tetap menggelontorkan anggaran untuk penanganan rumah

yang terdampak. "Ya, dari kita sekitar Rp1,1 miliar, untuk memperbaiki lahan atau rumah yang oleh warga diklaskan dan terpaksa mundur. Jadi, rumah yang mundur itu kita sempurnakan lagi, untuk rehabilitasinya pakai anggaran dari Pemkot," cetusnya.

Lebih lanjut, Heroe mengatakan, penataan kawasan kumuh memang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot dan harus terselesaikan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut-nya, kawasan kumuh di Kota Yogyakarta sejauh ini tersisa lebih kurang 160 hektar yang akan ditangani secara bertahap.

"Berdasarkan SK tahun lalu tinggal 70 hektar. Tapi, setelah diverifikasi, kita cek lagi, ternyata ada 160 hektar yang belum kita selesaikan. Harapannya, setiap tahun ada pertumbuhan dan, dua, atau tiga tahun lagi bisa terselesaikan, ya,

untuk seluruh Kota Yogyakarta," ungkap Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Hari Setyawana menandatangani, terdapat 38 rumah warga yang terdampak konsep riverside pedestrian di Jogoyudan, lalu sembilan rumah di Terban dan dua rumah di Wirogunan.

"Yang jelas alokasi anggaran untuk rumah terdampak ini sudah kita mulai sejak 2020 kemarin, kita alokasikan Rp450 juta. Sedangkan untuk 2021, kembali kita alokasikan, ya, lebih kurang Rp980 juta itu," terangnya.

Hari pun menjelaskan, sarana dan prasarana penunjang juga direalisasikan di kawasan tersebut. Mulai dari pengerasan jalan, penerangan jalan umum (PJU), maupun instalasi pengolahan air limbah domestik.

"Karena itu, kami berharap masyarakat setempat bisa ikut memelihara. Sekarang sudah dilakukan penataan, sama pemerintah, kita harus memelihara," katanya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005